

## **Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Seluma**

### **The Role Of The Agency For Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, And Family Planning In Accelerating The Reduction Of Stunting In Seluma Regency**

**Selfia Wulandari<sup>1)</sup>; Tuti Handayani<sup>2)</sup>; Yusuarsono<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup> **Universitas Dehasen Bengkulu**

**Email: <sup>1)</sup> [selfiawulandari264@gmail.com](mailto:selfiawulandari264@gmail.com)**

#### **How to Cite :**

Wulandari. S., Handayani. T., Yusuarsono. (2025). The Role Of The Agency For Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, And Family Planning In Accelerating The Reduction Of Stunting In Seluma Regency. *Journal of Multidisciplinary Research*. 2(1).

#### **ARTICLE HISTORY**

*Received [15 Agustus 2025]*

*Revised [22 September 2025]*

*Accepted [25 September 2025]*

#### **KEYWORDS**

*The Role Of The Office Of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, And Family Planning In Accelerating The Reduction Of Stunting In Seluma District.*

**This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license**



#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dinas pemberdayaan perempuan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana dalam percepatan penurunan stunting di kabupaten seluma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif Deskriptif. Informasi penelitian ini berjumlah lima (5) orang yang terdiri dari dua (2) informasi kunci dan tiga (3) informasi pokok. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan Teori peran menurut Soerjono soekanto (2001:242) mengenai teori peran : (1) Peran Aktif : Jumlah kegiatan program penyusunan edukasi, dan pelatihan yang diselenggarakan instansi setiap tahun dalam upaya penurunan stunting, kehadiran instansi dalam forum koordinasi lintas sektor penurunan stunting di tingkat daerah, jumlah kader perempuan atau relawan yang dilatih oleh instansi dalam isu pencegahan stunting, Jumlah laporan dan tindak lanjut kasus anak dan perempuan yang mengalami kekerasan atau keterlantaran yang berpotensi meningkatkan risiko stunting. (2) Peran Partisipatif: Keterlibatan instansi dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) untuk memasukkan isu pemberdayaan perempuan dan anak dalam strategi penurunan stunting, Jumlah Kelompok perempuan atau organisasi masyarakat perempuan yang difasilitasi instansi untuk berperan dalam program stunting, Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang difasilitasi instansi terkait pencegahan stunting, jumlah forum atau kegiatan koordinasi lintas sektor yang melibatkan instansi. (3) Peran Pasif: Keterlibatan dalam perumusan kebijakan dalam percepatan penurunan stunting, koordinasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting, Advokasi/kampanye kesadaran publik dalam percepatan penurunan stunting..

#### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the role of the women's empowerment, population control, and family planning agencies in accelerating the reduction of stunting in Seluma Regency. The method used in this study is descriptive qualitative. The research information consists of five (5) people, comprising two (2) key informants and three (3) main informants. Data collection methods included observation, interviews, and documentation. Based on the research results and discussion using Soerjono Soekanto's (2001:242) role theory regarding role theory: (1) Active Role: The number of educational and training programs organized by agencies each year in an effort to reduce stunting, the presence of agencies in cross-sector coordination forums on stunting reduction at the regional level, the number of female cadres or volunteers trained by agencies on the issue of stunting prevention, the number of reports and follow-ups on cases of children and women experiencing violence or neglect that have the potential to increase the risk of stunting. (2)*

*Participatory Role: Institutional involvement in development planning meetings (musrenbang) to include issues of women's and children's empowerment in stunting reduction strategies, Number of women's groups or women's community organizations facilitated by institutions to play a role in stunting programs, Level of community participation in activities facilitated by institutions related to stunting prevention, number of forums or cross-sector coordination activities involving institutions. (3) Passive Role: Involvement in policy formulation for accelerating stunting reduction, cross-sector coordination in accelerating stunting reduction, advocacy/public awareness campaigns in accelerating stunting reduction.*

## PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 1945 alinea IV menyebutkan bahwa salah satu tujuan pemerintahan Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Indikator keberhasilan kesejahteraan masyarakat salah satunya meliputi terciptanya kesehatan anggota keluarga. Karena, masa depan suatu bangsa terletak pada kemampuan dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju dan berkualitas untuk investasi menghadapi masa depan. (Chaerunissa, 2020)

Dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, Indonesia sebagai negara berkembang nyatanya masih memiliki permasalahan di bidang kesehatan yaitu masalah gizi. Dalam hal ini baik gizi buruk dan gizi kurang tepat dengan jumlah yang cukup tinggi. Persoalan malnutrisi ini menjadi persoalan yang serius karena bisa mengakibatkan anak menjadi stunting dan keterbatasan dalam berpikir. Saat ini stunting menjadi salah satu program nasional yang masih terus diperbaiki dan menjadi isu prioritas kesehatan di Indonesia. Stunting adalah proses gagal tumbuh secara normal baik tinggi dan berat badan bayi pada saat lahir. Hal ini akan berpengaruh pada keterbatasan kecerdasan yang dialami anak-anak di dalam usia 2 tahun. Penyebab utama dari stunting adalah bukan hanya dominan karena sebab gizi buruk pada masa kehamilan. Namun, terdapat juga faktor sosial ekonomi, ketersediaan pelayanan kesehatan seperti sarana dan prasarana air bersih dan fasilitas kesehatan lainnya. (Sutraningsih et al., 2021).

Salah satu tantangan bagi pemerintah dalam mengatasi stunting yaitu Indonesia memiliki ketersebaran penduduk yang tidak merata dan luas wilayah yang cukup besar, dan hal ini dijawab dengan disusunnya Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang tercantum pada Peraturan Presiden No.72 pada pasal 6 ayat 2 yang meliputi 5 (lima) pilar, yaitu: Komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi program pusat, daerah, dan desa, ketahanan pangan dan gizi dan pemantauan dan evaluasi. Pada pilar ketiga: konvergensi program pusat, daerah dan desa.

Konvergensi percepatan penurunan stunting merupakan kerjasama yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama dengan tujuan pada sasaran prioritas penurunan stunting. Penyelenggaraan dilakukan dengan konvergen artinya dilakukan secara intergrasi dan penyesuaian dengan kegiatan dan program pada tingkat kab/kota sampai ke tingkat desa. Oleh karena itu, peran Bappeda sebagai leading sector koordinasi diharapkan mampu mengendalikan OPD yang terlibat untuk turut serta dalam pelaksanaan program.

Saat ini landasan yang digunakan untuk penanganan stunting yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan. Pada tahun 2024 telah ditetapkan pada Peraturan Presiden pasal 5 ayat 1 bahwa dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi stunting harus dicapai sebesar 14 persen. Sejak program percepatan pencegahan stunting didirikan pada tahun 2018 lalu, ada 260 kabupaten kota menjadi wilayah prioritas program dan ditargetkan pada 2025 nanti seluruh kabupaten kota di Indonesia melaksanakan program percepatan pencegahan penurunan stunting.

**Tabel 1 Jumlah Balita Stunting di Kabupaten Selama Tahun 2021-2024**

No	Tahun	Jumlah Balita di Ukur	Jumlah Balita Stunting	Presentase Jumlah Balita Stunting
1	2021	13.239 balita	636 balita	4.80%
2	2022	13.224 balita	560 balita	4.23%
3	2023	12.000 balita	663 balita	5.53%
4	2024	12.571 balita	609 balita	4.78%

Sumber: E-PPGM, Dinas Kesehatan Kabupaten Selama

Berdasarkan data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) oleh Dinas Kesehatan untuk prevalensi stunting balita pada tahun 2021 terhitung 4,80% (646 jiwa) dari jumlah balita 13.239 jiwa. Tahun 2022 menurun menjadi 4.23% (560 jiwa). Tahun 2023 meningkat kembali menjadi 5.53% (663 Jiwa) dari jumlah 12.000 jiwa, dan kemudian turun kembali pada tahun 2024 menjadi 4.78% dari 12.571 jiwa. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa percepatan penurunan stunting telah dilakukan di Kabupaten Seluma namun dengan angka yang naik turun menandakan bahwa penanganan percepatan penurunan stunting belum maksimal, hal tersebut dikarenakan petugas gizi tidak ada lagi kegiatan *sweeping* penimbangan balita yang tidak datang ke posyandu. Sedangkan data prevalensi stunting balita di Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma pada tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2** Jumlah Balita Stunting di Kecamatan Seluma Barat Tahun 2021-2024

No	Tahun	Jumlah Balita di Ukur	Jumlah Balita Stunting
1	2021	620 balita	60 balita
2	2022	671 balita	34 balita
3	2023	659 balita	33 balita
4	2024	579 balita	20 balita

Sumber: *WebBangda, dinasP3APPKB*

Berdasarkan data WebBangda dinas P3APPKB untuk prevalensi stunting balita di Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma pada tahun 2021 berjumlah 60 balita dari jumlah 620 jiwa. Tahun 2022 menurun menjadi 34 balita. Tahun 2023 menurun kembali menjadi 33 balita dari jumlah 659 jiwa, dan kemudian turun kembali pada tahun 2024 menjadi 20 balita dari 579 jiwa. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa percepatan penurunan stunting telah dilakukan di Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma dengan angka yang menurun.

Dampak dari tingginya prevalensi stunting di suatu wilayah bukan hanya berdampak pada permasalahan kesehatan, namun dapat berdampak pada hal multidimensional, yang dapat menjadi permasalahan dalam berbagai situasi di suatu negara. Dalam contoh kasus kecil, jika seorang anak mengalami permasalahan stunting, maka akan berpotensi pada lambatnya perkembangan otak, dan untuk jangka panjang bisa terjadi pada permasalahan kecerdasan dalam berfikir, keterbelakangan mental, dan resiko penyakit kronis yang akan menjadi permasalahan dimasa yang akan mendatang. Dalam prevalensi yang tinggi atau jumlah kasus yang banyak, maka akan berdampak pada masa depan bangsa, seperti kesejahteraan dalam perekonomian yang akan terganggu, kemajuan negara, daya saing rendah, dan lain sebagainya.

Untuk melakukan percepatan penurunan stunting tersebut terdapat peraturan yang tercantum pada Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting pada pasal 10 ayat 3 tentang penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bahwa, dalam rangka pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kota, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa melakukan: Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, Peningkatan Kualitas Pelaksanaan, Peningkatan Kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, Peningkatan Sumber Daya Manusia. Berdasarkan Peraturan Bupati Seluma nomor 33 tahun 2020 peraturan ini menjadi dasar hukum untuk pembentukan DP3APPKB di Kabupaten Seluma peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait pembentukan dan fungsi dari UPTD perlindungan perempuan dan anak

Dinas P3APPKB memiliki peran penting dalam penanganan stunting melalui berbagai program dan kebijakan. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas P3APPKB diharapkan dapat melakukan intervensi yang efektif untuk mengurangi angka stunting terutama melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penyuluhan gizi, dan pemantauan kesehatan ibu dan anak.

Berdasarkan hasil observasi yang ditemukan bahwa persoalan jumlah anak yang mengalami stunting di Kabupaten Seluma masih naik turun, hal tersebut menandakan bahwa penanganan percepatan penurunan stunting masih kurang efektif, hal tersebut bisa saja terjadi karena kurangnya peran dinas P3APPKB Kabupaten Seluma dalam percepatan penurunan stunting di wilayah kabupaten seluma. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian peran dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Seluma.

## LANDASAN TEORI

### Peran

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "role" yang definisinya adalah "person's task or duty in undertaking". Menurut Riyadi dalam (Solahudin et al, 2022: 4; Lantaeda et al, 2017: 2). 'Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya'. Menurut Masondan M.C Eachern yang dikutip oleh David Berri. Peran adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu.

### DP3APPKB

DP3APPKB merupakan singkatan dari dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana adalah dinas yang bertugas menaungi urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana ditingkat daerah.

### Stunting

Stunting merupakan sebuah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Anak stunting mempunyai Intelligence Quotient (IQ) lebih rendah dibandingkan rata – rata IQ anak normal (Kemenkes RI, 2018). Stunting didefinisikan sebagai keadaan dimana status gizi pada anak menurut TB/U dengan hasil nilai Z Score = <-2 SD, hal ini menunjukkan keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek hasil dari gagal pertumbuhan.

## METODE PENELITIAN

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2007:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Koordinasi Pencegahan Stunting Di Kabupaten Seluma. Seperti yang dijelaskan oleh (Burhan Bungin, 2018), penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi suatu objek penelitian, kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi atau variabel tertentu. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dalam konteks kehidupan nyata tanpa memanipulasi variabel, sehingga hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai Peran Badan Perencanaan Pembangunan Dalam Koordinasi Pencegahan Stunting Di Kabupaten Seluma.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)

##### Peran Aktif

Peran aktif merupakan keterlibatan langsung suatu instansi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam lingkup percepatan penurunan stunting di Kabupaten Seluma, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) memegang peranan penting sebagai pelaksana program edukasi, pelatihan, koordinasi lintas sektor, pelibatan kader, serta penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang berpotensi menimbulkan stunting. Penilaian terhadap peran aktif DP3APPKB dalam penelitian ini dibagi dalam empat indikator, yaitu:

(1) jumlah kegiatan edukasi dan pelatihan yang diselenggarakan setiap tahun;

- (2) kehadiran instansi dalam forum koordinasi lintas sektor;
- (3) jumlah kader perempuan atau relawan yang dilatih; dan
- (4) jumlah laporan dan tindak lanjut kasus anak dan perempuan yang mengalami kekerasan atau keterlantaran.

### **Jumlah Kegiatan Edukasi Dan Pelatihan Yang Diselenggarakan Setiap Tahun**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yusnaini, S.Pd, selaku Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Seluma, dinyatakan bahwa dinas ini secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan edukatif dan pelatihan sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan penurunan stunting.



**Gambar 1 Kegiatan Edukasi Dan Pelatihan**

Dari ketiga informan pokok, ditemukan bahwa kegiatan edukasi dan pelatihan dilaksanakan secara berkala di tingkat desa dan komunitas. Meskipun jumlah pastinya bervariasi, keseluruhannya menunjukkan adanya aktivitas edukatif yang rutin dan terstruktur. Para kader dan tim lapangan juga secara aktif terlibat dalam pelatihan-pelatihan, baik sebagai peserta maupun pelaksana dalam menyampaikan edukasi ke masyarakat. Kegiatan ini banyak difasilitasi oleh lintas sektor seperti puskesmas dan pemerintah desa.

Berdasarkan gabungan informasi dari dua informan kunci dan tiga informan pokok, dapat disimpulkan bahwa peran aktif dalam bentuk kegiatan edukasi dan pelatihan telah dijalankan dengan baik oleh DP3APPKB Kabupaten Seluma dan didukung penuh oleh tim pelaksana di lapangan. Rata-rata terdapat 20 hingga 25 kegiatan per tahun yang mencakup penyuluhan, pelatihan kader, edukasi kelompok, hingga kampanye kesehatan. Materi yang diberikan meliputi aspek penting dalam pencegahan stunting seperti gizi, ASI eksklusif, sanitasi, pengasuhan anak, hingga perencanaan keluarga.

Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh instansi utama, tetapi juga secara kolaboratif dengan OPD lain, puskesmas, serta desa, dan melibatkan langsung para kader dan kelompok sasaran. Hal ini mencerminkan keterlibatan aktif lintas sektor serta pendekatan berbasis komunitas yang sangat krusial dalam menurunkan angka stunting secara berkelanjutan di Kabupaten Seluma.

### **Kehadiran Instansi Dalam Forum Koordinasi Lintas Sektor**

Dalam wawancara dengan Yusnaini, S.Pd, Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Seluma, diketahui bahwa pihak instansi memiliki peran yang sangat aktif dalam berbagai forum koordinasi lintas sektor. Kehadiran mereka tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam membahas strategi bersama



**Gambar 2 Kegiatan Wawancara Dengan Yusnaini, S.Pd, Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Seluma**

Dari para informan pokok, terlihat bahwa kehadiran instansi di lapangan sangat dirasakan oleh tim kader dan pengurus TPPS. Kehadiran ini tidak hanya dalam bentuk formalitas, tetapi dalam pelaksanaan langsung seperti rapat rembuk stunting, forum musyawarah desa, dan pertemuan koordinasi teknis. Instansi terlihat aktif berkomunikasi, menyampaikan data, serta membuka ruang diskusi untuk pengambilan keputusan bersama.

Dari keseluruhan wawancara, dapat disimpulkan bahwa instansi pemerintah daerah, khususnya DP3APPKB Kabupaten Seluma, memiliki peran dan kehadiran yang sangat aktif dalam forum koordinasi lintas sektor di semua tingkatan, mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten. Forum ini mencakup rembuk stunting, pertemuan TPPS, lokakarya mini, hingga musyawarah perencanaan pembangunan.

Kehadiran instansi tidak hanya bersifat administratif, namun juga mengandung muatan substansi yang penting seperti penyampaian data keluarga risiko stunting, usulan intervensi, dan evaluasi bersama. Hal ini menunjukkan komitmen lintas sektor yang kuat dalam menciptakan penurunan angka stunting yang terarah, terencana, dan berbasis data nyata dari lapangan.

### **Jumlah Kader Perempuan Atau Relawan Yang Dilatih**

Dalam wawancara bersama Yusnaini, S.Pd, Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Seluma, diketahui bahwa pelatihan terhadap kader perempuan dan relawan merupakan bagian penting dari strategi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan stunting. Ia menegaskan bahwa pelatihan ini diberikan secara rutin dan terarah.

Para informan pokok menyampaikan bahwa pelatihan kader perempuan merupakan bagian nyata dari aktivitas rutin yang dilakukan instansi. Kegiatan pelatihan diberikan sebelum pelaksanaan program di lapangan dan mencakup keterampilan teknis, edukasi gizi, komunikasi interpersonal, serta praktik langsung di komunitas. Pelatihan tersebut sangat membantu kader dalam menyampaikan informasi secara efektif kepada masyarakat sasaran.

Dari keseluruhan wawancara, baik dari informan kunci maupun informan pokok, dapat disimpulkan bahwa instansi terkait secara aktif melibatkan dan melatih kader perempuan serta relawan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Seluma.

Jumlah kader yang dilatih per tahun berkisar antara 30 hingga 45 orang, dan pelatihan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak seperti DP3APPKB, puskesmas, serta pemerintah desa. Materi pelatihan mencakup gizi anak, komunikasi keluarga, edukasi kesehatan, hingga strategi pengasuhan. Keberadaan kader yang terlatih ini menjadi elemen penting dalam menjangkau keluarga dan masyarakat secara langsung, sehingga pendekatan pencegahan stunting dapat dilakukan lebih menyeluruh dan efektif.

### **Jumlah Laporan Dan Tindak Lanjut Kasus Anak Dan Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Atau Keterlantaran**

Dalam wawancara dengan Yusnaini, S.Pd, Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Seluma, dijelaskan bahwa dinas menerima sejumlah laporan terkait kekerasan atau keterlantaran anak dan perempuan yang berpotensi berdampak pada kondisi stunting. Ia menyampaikan bahwa laporan tersebut ditindaklanjuti secara terintegrasi.

Dari ketiga informan pokok dapat disimpulkan bahwa meskipun jumlah laporan tidak tinggi, kader dan tim lapangan berperan sebagai detektor awal dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus kekerasan atau keterlantaran. Penanganan dilakukan melalui koordinasi lintas pihak, dan penekanan diberikan pada dampak kasus tersebut terhadap kondisi tumbuh kembang anak. Kader juga dilibatkan dalam proses pendampingan hingga rujukan. Dari keseluruhan wawancara, baik dari pihak instansi maupun pelaksana lapangan, dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan atau keterlantaran terhadap anak dan perempuan tetap menjadi perhatian penting dalam upaya pencegahan stunting, meskipun bukan merupakan fokus utama program.

Jumlah kasus yang terdata berkisar antara 15 hingga 28 laporan per tahun, dan seluruhnya ditindaklanjuti dengan pendekatan kolaboratif melalui jalur hukum, psikologis, dan sosial. Kader perempuan menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan melaporkan kasus tersebut. Penanganan yang terstruktur dan responsif terhadap isu ini menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan stunting di Kabupaten Seluma tidak hanya berfokus pada aspek gizi, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan sosial dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada kegiatan posyandu di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Seluma Barat, tampak bahwa DP3APPKB turut aktif dalam mendukung penyelenggaraan penyuluhan gizi kepada ibu hamil dan balita. Dalam kegiatan tersebut, kader yang telah dilatih memberikan edukasi mengenai pentingnya pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, praktik pemberian ASI eksklusif, serta pencegahan stunting melalui kebersihan lingkungan dan sanitasi. Materi yang disampaikan oleh kader sejalan dengan program pelatihan yang telah difasilitasi DP3APPKB.

Observasi juga menunjukkan bahwa DP3APPKB turut berperan menyediakan media edukatif seperti leaflet dan poster, serta membantu memfasilitasi kehadiran narasumber dari dinas terkait.

Kegiatan berjalan dengan antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat. Hal ini tercermin dari keterlibatan ibu-ibu balita dan ibu hamil dalam sesi tanya jawab dan praktik demo masak makanan sehat. Namun demikian, masih dijumpai kendala seperti keterbatasan alat peraga dan belum optimalnya distribusi jadwal kunjungan kader ke seluruh wilayah dusun. Meski demikian, keterlibatan DP3APPKB dalam mendukung kapasitas kader dan memfasilitasi kegiatan edukatif telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara informan kunci, informan pokok, dan hasil observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa DP3APPKB Kabupaten Seluma menjalankan peran aktif yang signifikan dalam percepatan penurunan stunting. Kegiatan penyuluhan, edukasi, dan pelatihan dilakukan secara rutin dan menyasar kelompok strategis seperti ibu hamil, pasangan usia subur, remaja, dan kader posyandu. Instansi ini juga secara aktif terlibat dalam forum koordinasi lintas sektor dan menjadi penggerak dalam kolaborasi antar lembaga.

Selain itu, DP3APPKB menunjukkan komitmen dalam pelatihan kader perempuan dan relawan untuk mendukung pencegahan stunting secara berkelanjutan. Tindakan nyata dalam menindaklanjuti laporan kekerasan terhadap anak dan perempuan menunjukkan perhatian terhadap aspek sosial yang turut memengaruhi kondisi stunting. Dukungan DP3APPKB tidak hanya pada tataran teknis, tetapi juga pada pembentukan ekosistem kerja lintas sektor dan penguatan kapasitas masyarakat melalui pendekatan berbasis keluarga. Dengan demikian, peran aktif DP3APPKB tidak hanya terbukti secara administratif dan programatik, namun juga berdampak secara langsung di tingkat masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan komunitas dalam upaya pencegahan stunting.

### **Peran Partisipatif**

Peran partisipatif merujuk pada keterlibatan aktif sebuah instansi dalam mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan dan memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan program, khususnya dalam ranah penurunan stunting. Dalam penelitian ini, penilaian terhadap peran partisipatif DP3APPKB mencakup empat indikator utama:

- (1) keterlibatan instansi dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) untuk memasukkan isu pemberdayaan perempuan dan anak dalam strategi penurunan stunting;
- (2) jumlah kelompok perempuan atau organisasi masyarakat perempuan yang difasilitasi instansi untuk berperan dalam program stunting;
- (3) tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang difasilitasi instansi terkait pencegahan stunting; dan
- (4) jumlah forum atau kegiatan koordinasi lintas sektor yang melibatkan instansi.

### **Keterlibatan Instansi Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Untuk Memasukkan Isu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Strategi Penurunan Stunting.**

Dalam wawancara dengan Yusnaini, S.Pd, selaku Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Seluma, dijelaskan bahwa pihaknya selalu aktif mengikuti proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga kabupaten. Melalui forum ini, instansi mengusulkan program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam konteks penurunan stunting. Dari hasil wawancara dengan kelima informan, dapat disimpulkan bahwa instansi terkait—khususnya DP3APPKB—secara aktif berpartisipasi dalam proses Musrenbang di semua tingkatan. Keterlibatan ini bukan sekadar administratif, tetapi substansial, melalui penyampaian isu strategis dan usulan program terkait pemberdayaan perempuan, pengasuhan anak, dan pencegahan stunting.

Musrenbang dijadikan sebagai saluran formal untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan daerah. Instansi juga membuka ruang partisipasi bagi kader dan kelompok dampingan agar aspirasi dari lapisan bawah dapat masuk ke dalam agenda pembangunan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan penurunan stunting di Kabupaten Seluma tidak hanya dilakukan secara teknis, tetapi juga demokratis dan berbasis aspirasi masyarakat.

### **Jumlah Kelompok Perempuan Atau Organisasi Masyarakat Perempuan Yang Difasilitasi Instansi Untuk Berperan Dalam Program Stunting**

Dalam wawancara dengan Yusnaini, S.Pd, Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Seluma, beliau menyatakan bahwa fasilitasi kelompok perempuan merupakan bagian dari strategi pelibatan masyarakat dalam program penurunan stunting. Kelompok-kelompok ini tidak hanya diberi pelatihan, tetapi juga pendampingan dan dukungan lainnya

Dari kedua informan kunci dapat disimpulkan bahwa instansi DP3APPKB secara aktif memfasilitasi kelompok perempuan dalam berbagai bentuk, baik yang berbasis keluarga (BKB, BKR, UPPKA),

organisasi kemasyarakatan (PKK, majelis taklim), maupun kelompok ekonomi produktif (wanita tani). Jumlah kelompok yang difasilitasi berkisar antara 12 hingga 17 kelompok. Bentuk fasilitasi meliputi pelatihan, pendampingan program, edukasi, serta bantuan stimulan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan. Dalam wawancara dengan Hetti Susanti, Ketua Kader TPPS, ia mengonfirmasi bahwa kelompok perempuan seperti BKB, BKR, dan UPPKA memang diberdayakan dan dilibatkan langsung dalam kegiatan pencegahan stunting. Ia menyampaikan:

Berdasarkan keterangan informan pokok, diketahui bahwa kelompok-kelompok perempuan yang difasilitasi tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut serta secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Kelompok seperti BKB, BKR, dan UPPKA disebut sebagai contoh nyata kelompok yang diberdayakan dan dilibatkan dalam penyuluhan, edukasi gizi, dan kegiatan posyandu. Beberapa kelompok informal seperti pengajian ibu-ibu juga diajak terlibat sebagai mitra penyebar informasi di komunitas.

Secara keseluruhan, baik dari sisi instansi (informan kunci) maupun dari pelaksana lapangan (informan pokok), menunjukkan bahwa fasilitasi terhadap kelompok perempuan telah dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Jumlah kelompok yang difasilitasi berkisar antara 12 hingga 17 kelompok, dan bentuk fasilitasi mencakup pelatihan, pendampingan, edukasi, penyediaan media komunikasi, serta dukungan kegiatan produktif.

Kelompok perempuan yang dilibatkan memiliki peran penting tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai agen perubahan yang turut mengedukasi dan menggerakkan masyarakat dalam pencegahan stunting. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penurunan stunting di Kabupaten Seluma dilakukan dengan pendekatan berbasis komunitas, inklusif, dan partisipatif, dengan mengoptimalkan potensi kelompok perempuan yang ada di setiap desa.

### **Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Yang Difasilitasi Instansi Terkait Pencegahan Stunting**

Berdasarkan wawancara dengan Yusnaini, S.Pd, Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Seluma, disampaikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan stunting tergolong tinggi. Masyarakat dari berbagai kalangan terlibat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan, baik sebagai peserta maupun relawan

Dari penuturan informan kunci, terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam program pencegahan stunting cukup tinggi, baik secara jumlah maupun kualitas. Kegiatan yang difasilitasi oleh instansi seperti penyuluhan, kampanye, dan pelatihan mendapatkan respons positif. Bahkan ada peningkatan partisipasi aktif seperti menjadi relawan, menyebarkan informasi, dan mengikuti kegiatan lanjutan.

Dari sisi pelaksana lapangan, Hetti Susanti, Ketua Kader TPPS, menjelaskan bahwa masyarakat, terutama ibu-ibu, menunjukkan partisipasi yang meningkat dari waktu ke waktu. Malyatul Aini, anggota TPPS, juga menyampaikan bahwa bentuk partisipasi masyarakat sangat beragam, mulai dari menghadiri acara hingga membantu teknis pelaksanaan kegiatan

Dari ketiga informan pokok, ditemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan stunting cukup tinggi dan terus meningkat. Masyarakat tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga berkontribusi dalam bentuk dukungan teknis, keterlibatan sebagai relawan, serta memberikan masukan terhadap kegiatan yang dijalankan. Kader melihat hal ini sebagai tanda bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif sudah berjalan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan kunci dan informan pokok, dapat disimpulkan bahwa bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam program pencegahan stunting yang difasilitasi oleh instansi sangat menggembirakan. Masyarakat tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga aktif dalam pelaksanaan teknis, menyampaikan aspirasi, hingga menjadi relawan.

Kegiatan seperti penyuluhan gizi, kampanye, demo masak, hingga pengukuran balita menunjukkan tingginya keterlibatan ibu-ibu, remaja, dan tokoh masyarakat. Partisipasi aktif ini menjadi indikator penting bahwa intervensi stunting berbasis komunitas di Kabupaten Seluma telah diterima dengan baik dan mendapat dukungan luas dari masyarakat.

### **Jumlah Forum Atau Kegiatan Koordinasi Lintas Sektor Yang Melibatkan Instansi**

Berdasarkan wawancara dengan Yusnaini, S.Pd, Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Seluma, dinyatakan bahwa instansi terlibat dalam berbagai forum koordinasi lintas sektor sepanjang tahun, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta aktif. Berdasarkan keterangan dari informan pokok, terlihat bahwa instansi secara rutin terlibat dalam forum koordinasi lintas sektor yang jumlahnya berkisar 10–15 forum per tahun. Bentuk keterlibatan tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga aktif berdiskusi, berbagi data, dan menyusun strategi bersama dengan pihak-pihak di desa, puskesmas, dan OPD lainnya. Koordinasi ini sangat membantu keterpaduan pelaksanaan program di lapangan.

Dari keseluruhan wawancara, baik dari informan kunci maupun informan pokok, dapat disimpulkan bahwa instansi yang menangani isu stunting di Kabupaten Seluma secara aktif terlibat dalam berbagai forum dan kegiatan koordinasi lintas sektor. Dalam satu tahun, tercatat keikutsertaan instansi dalam 11 hingga 14 forum atau pertemuan koordinasi, baik sebagai penyelenggara maupun peserta. Forum tersebut mencakup rembuk stunting, rapat TPPS, musrenbang, pertemuan teknis lintas OPD, hingga diskusi desa, yang semuanya memiliki peran penting dalam menyinergikan kebijakan dan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.

Keterlibatan yang konsisten ini menunjukkan bahwa penanganan stunting dilakukan secara terpadu, kolaboratif, dan tidak berjalan sendiri-sendiri, sehingga mendorong efektivitas dan efisiensi intervensi di lapangan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di beberapa kegiatan masyarakat seperti kelas ibu hamil, posyandu balita, serta pelatihan kader di Desa Lubuk Resam dan sekitarnya, terlihat bahwa DP3APPKB Kabupaten Seluma memainkan peran partisipatif yang kuat. Dalam pelaksanaan kegiatan, instansi ini tidak hanya hadir sebagai fasilitator tetapi juga sebagai penghubung antar pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk pemerintah desa, puskesmas, dan kelompok perempuan lokal.

Pada kegiatan kelas ibu hamil, misalnya, terlihat keterlibatan aktif dari kelompok BKB dan kader perempuan yang sebelumnya telah dilatih oleh DP3APPKB. Para peserta mengikuti sesi edukasi gizi, pemantauan kehamilan, serta praktik langsung seperti demo memasak makanan sehat. Antusiasme peserta cukup tinggi, mencerminkan adanya penerimaan positif terhadap program yang difasilitasi oleh DP3APPKB. Selain itu, pada sesi diskusi kelompok kecil, peserta secara terbuka menyampaikan kendala yang mereka hadapi dalam pengasuhan anak dan pemenuhan gizi, yang langsung ditanggapi oleh kader dan tenaga kesehatan yang hadir.

Kegiatan koordinasi lintas sektor yang diamati juga memperlihatkan upaya DP3APPKB dalam mengintegrasikan isu pemberdayaan perempuan dan penurunan stunting ke dalam kebijakan pembangunan desa. Dalam forum ini, DP3APPKB menjadi salah satu instansi yang mengusulkan penguatan peran kelompok perempuan serta pendanaan kegiatan yang berorientasi pada pencegahan stunting. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi DP3APPKB tidak bersifat simbolis, melainkan nyata dalam mendorong perubahan pada tingkat kebijakan dan implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara informan kunci, informan pokok, serta observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa peran partisipatif DP3APPKB Kabupaten Seluma sangat kuat dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Instansi ini tidak hanya aktif dalam menyuarakan isu pemberdayaan perempuan dan anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan, tetapi juga memfasilitasi kelompok perempuan serta mendorong keterlibatan masyarakat secara luas dalam berbagai kegiatan edukatif dan preventif.

DP3APPKB menunjukkan komitmen untuk membangun kolaborasi lintas sektor, memperkuat kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan, serta menciptakan ruang partisipasi yang inklusif. Keterlibatan instansi ini dalam forum koordinasi dan pemberdayaan masyarakat telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting, serta menguatkan peran perempuan sebagai agen perubahan di komunitas masing-masing. Dengan demikian, peran partisipatif DP3APPKB tidak hanya memperkuat program dari sisi kelembagaan, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan generasi yang sehat dan bebas dari stunting.

### **Peran Pasif**

Peran pasif dalam lingkup ini bukan berarti tidak melakukan apa-apa, melainkan menunjuk pada peran yang tidak berada di garis depan, namun tetap berkontribusi dalam proses strategis dan pendukung, seperti pengumpulan data, masukan kebijakan, dan advokasi publik. Penilaian terhadap peran pasif DP3APPKB dalam percepatan penurunan stunting mencakup tiga indikator utama, yaitu:

- (1) keterlibatan dalam perumusan kebijakan,
- (2) koordinasi lintas sektor, dan
- (3) kegiatan advokasi atau kampanye kesadaran publik.

### **Keterlibatan Dalam Perumusan Kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yusnaini, S.Pd, Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Seluma, diketahui bahwa meskipun peran perumusan kebijakan secara formal berada pada level perencana seperti Bappeda, DP3APPKB tetap aktif berkontribusi dalam bentuk masukan substantif. Dari ketiga informan pokok dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak secara langsung merumuskan kebijakan, tim lapangan seperti kader dan anggota TPPS ikut berkontribusi dalam bentuk penyampaian data dan laporan kondisi faktual, yang menjadi masukan penting bagi instansi penyusun kebijakan.

Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang solid antara realitas lapangan dengan arah kebijakan yang disusun, melalui saluran komunikasi dua arah. Secara umum, hasil wawancara menunjukkan bahwa instansi terkait, khususnya DP3APPKB Kabupaten Seluma, memiliki keterlibatan yang signifikan dalam proses perumusan kebijakan percepatan penurunan stunting, meskipun secara teori peran tersebut dikategorikan sebagai "pasif".

Keterlibatan ini dilakukan melalui penyediaan data akurat, penyusunan rekomendasi program, serta partisipasi dalam forum perencanaan seperti Musrenbang, RPJMD, dan Renja OPD. Di sisi lain, tim pelaksana lapangan seperti kader dan TPPS juga berperan sebagai sumber data dan pengusul program, memastikan bahwa arah kebijakan tidak lepas dari kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, perumusan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Seluma dilakukan secara kolaboratif, berbasis bukti lapangan, dan melibatkan lintas sektor serta pelibatan aktif komunitas.

### **Koordinasi Lintas Sektor**

Berdasarkan wawancara dengan Yusnaini, S.Pd, Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Seluma, disampaikan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kekuatan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Beliau menjelaskan bahwa DP3APPKB sangat aktif dalam menjalin sinergi dengan berbagai OPD terkait

Berdasarkan wawancara dengan para informan pokok, terlihat bahwa koordinasi lintas sektor sangat nyata dan berdampak di lapangan. Instansi tidak hanya berkoordinasi di tingkat atas, tetapi juga sampai ke level desa, memastikan bahwa setiap elemen dari program penurunan stunting terhubung dan saling mendukung. Peran kader dan masyarakat pun diperkuat melalui dukungan dari koordinasi antarpihak. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa instansi pemerintah, khususnya DP3APPKB, memiliki keterlibatan aktif dalam koordinasi lintas sektor untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Seluma. Koordinasi ini melibatkan berbagai dinas teknis, Bappeda, pemerintah desa, puskesmas, hingga tokoh masyarakat.

Kegiatan koordinasi dilakukan secara formal maupun informal, melalui forum seperti rembuk stunting, rapat TPPS, forum data, dan pertemuan rutin lintas OPD. Hal ini menunjukkan bahwa program penurunan stunting tidak dijalankan secara sektoral atau sendiri-sendiri, melainkan melalui kerja kolaboratif dan terintegrasi yang memperkuat efektivitas di lapangan.

### **Kegiatan Advokasi Atau Kampanye Kesadaran Publik**

Dalam wawancara dengan Yusnaini, S.Pd, Kepala Dinas DP3APPKB Kabupaten Seluma, diketahui bahwa instansi telah melakukan berbagai bentuk advokasi dan kampanye terkait percepatan penurunan stunting, baik secara langsung kepada pemangku kepentingan maupun kepada masyarakat luas. Dari sisi informan pokok, terlihat bahwa kegiatan kampanye dilakukan secara kreatif dan dekat dengan budaya lokal masyarakat.

Para kader terlibat langsung dalam menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dicerna oleh warga, baik melalui media digital maupun pertemuan sosial. Kegiatan ini bertujuan mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat secara persuasif, terutama mengenai pentingnya gizi, ASI, KB, dan pola asuh sehat. Dari keseluruhan wawancara, baik dari instansi pengelola maupun pelaksana lapangan, dapat disimpulkan bahwa advokasi dan kampanye penurunan stunting dilakukan secara aktif, sistematis, dan menyeluruh di Kabupaten Seluma.

Advokasi diarahkan kepada para pengambil kebijakan dan pemegang anggaran agar lebih berpihak kepada program stunting, sedangkan kampanye menyasar masyarakat luas melalui berbagai media dan kegiatan sosial. Kampanye dilakukan dalam bentuk yang beragam, seperti penyuluhan, spanduk, media sosial, gerakan makan sehat, dan edukasi berbasis komunitas. Dengan pendekatan yang menggabungkan komunikasi interpersonal, media massa, dan kegiatan kolaboratif, kegiatan kampanye di Kabupaten Seluma telah menjadi pilar penting dalam membangun kesadaran publik untuk bersama-sama mencegah dan menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan yang dilakukan pada saat kegiatan rapat koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan advokasi di tingkat desa, terlihat bahwa DP3APPKB Kabupaten Seluma turut terlibat dalam proses penyusunan strategi dan pelaksanaan kampanye penurunan stunting. Meskipun kegiatan tersebut tidak selalu berlangsung di bawah kepemimpinan langsung DP3APPKB, namun instansi ini selalu hadir sebagai pemberi masukan dan data, serta ikut mengawal sinkronisasi program antar OPD.

Dalam salah satu kegiatan koordinasi tingkat kecamatan, DP3APPKB hadir membawa data dari kelompok dampingan dan turut serta dalam menyusun rekomendasi kegiatan tahun depan bersama Bappeda, Dinas Kesehatan, dan pihak desa. Selain itu, dalam kegiatan kampanye publik, terlihat distribusi materi edukasi seperti leaflet, spanduk, dan video singkat mengenai gizi dan pencegahan stunting. Keterlibatan DP3APPKB juga nampak dari pendampingan langsung terhadap kegiatan remaja

dalam program Duta Stunting dan pelaksanaan Gerakan Makan Ikan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa meskipun tidak selalu terlihat di garis depan, DP3APPKB menjalankan peran pasif secara strategis melalui penyediaan data, advokasi kepada pembuat kebijakan, serta penguatan masyarakat melalui media komunikasi dan kampanye.

## **Pembahasan**

### **Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)**

#### **Peran Aktif**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, diketahui bahwa DP3APPKB Kabupaten Seluma memiliki peran aktif yang cukup kuat dalam upaya percepatan penurunan stunting. Peran aktif tersebut ditunjukkan melalui berbagai kegiatan penyuluhan, edukasi, pelatihan kader, serta fasilitasi kegiatan di posyandu dan desa-desa. Dinas ini secara rutin mengadakan penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang, pemberian ASI eksklusif, kesehatan ibu dan anak, serta pelatihan untuk kader posyandu dan kader keluarga berencana. Selain itu, DP3APPKB juga aktif melatih kader perempuan dan relawan dari berbagai unsur masyarakat sebagai mitra strategis dalam penanggulangan stunting.

Jika dikaitkan dengan teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2012:212), peran aktif merupakan aktivitas nyata yang dijalankan oleh individu atau lembaga karena kedudukannya dalam suatu struktur sosial. Peran ini diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas, kewajiban, dan fungsi secara langsung. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa DP3APPKB menjalankan peran aktif tersebut dengan optimal melalui keterlibatan langsung dalam berbagai program, tidak hanya di tataran administrasi, tetapi juga di tingkat pelaksanaan kegiatan di masyarakat. Program penyuluhan, pelatihan kader, serta edukasi tentang kesehatan ibu dan anak yang dilakukan DP3APPKB merupakan implementasi nyata dari peran aktif tersebut.

Pelaksanaan peran aktif DP3APPKB Kabupaten Seluma juga terlihat dari keterlibatan langsung dalam pelatihan kader perempuan dan relawan di berbagai desa. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas masyarakat, tetapi juga memperluas jangkauan edukasi mengenai pentingnya pencegahan stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dinas tersebut tidak hanya menjalankan tugas formalnya, tetapi juga memberdayakan masyarakat desa secara langsung sebagai mitra dalam upaya penanggulangan stunting.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini mempertegas bahwa peran aktif DP3APPKB Kabupaten Seluma telah berjalan sesuai dengan teori Soerjono Soekanto, serta sejalan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu di daerah lain. Meski demikian, dari hasil wawancara juga terlihat bahwa peran aktif ini masih perlu didukung dengan anggaran yang memadai dan peningkatan frekuensi kegiatan agar cakupan pelayanan bisa lebih merata di seluruh desa. Hal ini senada dengan hasil penelitian Nurlili yang menyebutkan bahwa salah satu hambatan peran aktif di lapangan adalah keterbatasan sumber daya dan dana yang tersedia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran aktif DP3APPKB Kabupaten Seluma dalam percepatan penurunan stunting telah terlaksana sesuai teori dan praktik ideal, meskipun masih memerlukan optimalisasi dari sisi dukungan anggaran, sarana, dan personel di lapangan agar capaian program lebih maksimal dan merata.

#### **Peran Partisipatif**

Selain menjalankan peran aktif, DP3APPKB Kabupaten Seluma juga melaksanakan peran partisipatif dengan terlibat aktif dalam berbagai forum lintas sektor seperti rembuk stunting, Musrenbang, serta gugus tugas percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Keterlibatan ini mencerminkan pelaksanaan fungsi partisipatif yang bertujuan untuk membangun sinergi antar instansi serta mendorong peran aktif masyarakat dalam program pencegahan stunting.

Menurut teori peran Soerjono Soekanto (2012:212), peran partisipatif adalah bentuk sumbangsih atau keterlibatan langsung dari individu maupun lembaga dalam aktivitas kelompok yang bersifat kolektif. DP3APPKB Kabupaten Seluma menunjukkan peran partisipatifnya dengan berperan sebagai mitra dalam menyusun kebijakan, mengusulkan program prioritas melalui Musrenbang, serta memfasilitasi partisipasi kelompok perempuan, PKK, dan dasawisma dalam program edukasi gizi dan sanitasi lingkungan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa DP3APPKB Kabupaten Seluma telah menjalankan peran partisipatif sesuai konsep yang dikemukakan Soerjono Soekanto. Keterlibatan dalam forum lintas sektor serta fasilitasi kelompok perempuan dan masyarakat desa menjadi kekuatan dalam memperluas cakupan program pencegahan stunting.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Peran Aktif  
DP3APPKB Kabupaten Seluma menjalankan peran aktif yang signifikan dalam percepatan penurunan stunting. Kegiatan penyuluhan, edukasi, dan pelatihan dilakukan secara rutin dan menjangkau kelompok strategis seperti ibu hamil, pasangan usia subur, remaja, dan kader posyandu. Instansi ini juga secara aktif terlibat dalam forum koordinasi lintas sektor dan menjadi penggerak dalam kolaborasi antar lembaga.
2. Peran Partisipatif  
DP3APPKB Kabupaten Seluma sangat kuat dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Instansi ini tidak hanya aktif dalam menyuarakan isu pemberdayaan perempuan dan anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan, tetapi juga memfasilitasi kelompok perempuan serta mendorong keterlibatan masyarakat secara luas dalam berbagai kegiatan edukatif dan preventif.
3. Peran Pasif  
DP3APPKB Kabupaten Seluma turut terlibat dalam proses penyusunan strategi dan pelaksanaan kampanye penurunan stunting. Meskipun kegiatan tersebut tidak selalu berlangsung di bawah kepemimpinan langsung DP3APPKB, namun instansi ini selalu hadir sebagai pemberi masukan dan data, serta ikut mengawal sinkronisasi program antar OPD.

Oleh karena itu, DP3APPKB Kabupaten Seluma telah menjalankan ketiga peran—aktif, partisipatif, dan pasif—secara sinergis dan saling melengkapi. Ketiganya membuktikan bahwa kehadiran DP3APPKB sangat penting dalam mendorong percepatan penurunan stunting berbasis pemberdayaan perempuan, kolaborasi lintas sektor, serta pendekatan edukatif yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

### Saran

1. Untuk DP3APPKB Kabupaten Seluma  
Perlu dilakukan peningkatan intensitas dan pemerataan kegiatan di seluruh desa, serta penguatan monitoring dan evaluasi program stunting agar hasilnya dapat terukur dan berkelanjutan. Perlu juga menyesuaikan jadwal kegiatan dengan waktu luang masyarakat agar partisipasi semakin tinggi.
2. Untuk Pemerintah Daerah (Bappeda dan OPD terkait)  
Disarankan agar memberikan dukungan anggaran yang lebih memadai untuk pelaksanaan program DP3APPKB, terutama dalam pelatihan kader dan penyediaan fasilitas edukasi. Selain itu, penting untuk memperkuat integrasi lintas sektor dalam penyusunan kebijakan berbasis data lapangan.
3. Untuk Masyarakat dan Kelompok Perempuan  
Diharapkan dapat terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan posyandu, penyuluhan, dan pelatihan. Kader desa dan ibu-ibu balita juga perlu menjadi agen informasi dalam menyebarkan pengetahuan tentang gizi dan pencegahan stunting di lingkungannya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2021). Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2021–2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). Profil Kesehatan Indonesia 2022. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). Peran Kementerian PPPA dalam Pencegahan Stunting. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
- Mutia, H. (2024). Pendamping Kampung Kb Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Serta Keluarga Berencana (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Nurelisa, N. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penurunan Stunting Di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju= The Role Of Local Government In Reducing Stunting In Mamuju District (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Prasetyo, A., & Nuraini, D. (2021). Peran keluarga dalam pencegahan stunting melalui pola asuh dan gizi seimbang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(2), 123–131.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cetakan Ke-44). Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- UNICEF Indonesia. (2021). Ringkasan Kebijakan: Pencegahan Stunting di Indonesia. UNICEF Indonesia.
- 32** | Selfia Wulandari, Tuti Handayani, Yusuwarsono; *The Role Of The Agency For Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, And Family Planning In ...*